



PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH CAMAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBUATAN E-KTP DI KANTOR CAMAT LIGUNG

Oleh :
Dr. H. DIDING BAJURI, M.Si

ABSTRAK

Hasil pengamatan penyusun di kantor Camat Ligung ternyata ditemukan masalah yang mengarah pada belum meningkatnya efektivitas pelayanan dalam pembuatan e-ktp. Indikator masalah tersebut sebagai berikut : Masih kurang optimal pelayanan dalam pembuatan e-ktp; Masih adanya keluhan masyarakat atas pelayanan dalam pembuatan e-ktp yaitu dalam segi waktu dan pengetikan; Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur penyelenggaraan e-ktp kepada masyarakat.

Keadaan tersebut mencerminkan bahwa belum meningkatnya efektivitas pelayanan dalam pembuatan e-ktp. Hal ini diduga: pengawasan yang dilakukan oleh Camat terhadap pegawai kurang fleksibel; pengawasan yang dilakukan oleh Camat kurang bersifat ekonomis; pengawasan yang dilakukan oleh Camat kurang dimengerti.

Landasan teori mengenai pengawasan dari M. Manullang dan parameternya menggunakan prinsip-prinsip pengawasan, sedangkan efektivitas pelayanan dalam pembuatan e-ktp dari H. Ibrahim Lubis, parameter yang digunakan yaitu efektivitas yang berdaya guna yang berarti tepat, cepat, hemat, dan selamat.

Adapun hipotesis yang penyusun ajukan : "Jika pelaksanaan pengawasan oleh Camat didasarkan pada prinsip-prinsip pengawasan, maka efektivitas pelayanan dalam pembuatan e-ktp di kantor Camat Sukahaji meningkat".

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi lapangan observasi, wawancara dan angket. Populasi sebanyak 25 orang pegawai, seluruhnya dijadikan sampel menggunakan teknik total sampling. Untuk Camat dilakukan wawancara dan 24 orang pegawai lainnya diberikan angket.

Dari hasil penelitian dan analisis data diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan Camat sebesar 60,18% dengan predikat "cukup baik", sedangkan efektivitas pelayanan dalam pembuatan e-ktp sebesar 57,29% dengan predikat "cukup baik".

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan didasarkan pada prinsip-prinsip pengawasan mempunyai pengaruh terhadap efektivitas pelayanan dalam pembuatan e-ktp, hal ini terlihat dari hasil penelitian penerapan prinsip-prinsip pengawasan baru mencapai predikat "cukup baik" menyebabkan efektivitas pelayanan dalam pembuatan e-ktp di kantor Camat Ligung baru mencapai predikat "cukup baik" juga. Dengan demikian maka hipotesis yang penyusun ajukan dapat diterima dan teruji kebenarannya.

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terus menerus, bertahap dan berkesinambungan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, baik material

maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya pemerintah Republik Indonesia menerapkan kebijakan Otonomi Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah, Kabupaten Majalengka tengah melaksanakan Pembangunan di segala bidang yang menyangkut semua aspek kehidupan, yaitu bidang Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya, Agama, dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan dengan baik, sistematis, efektif, dan efisien.

Pelaksanaan pembangunan agar tercapai sesuai yang diharapkan, maka salah satu unsur yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah adalah mengenai kualitas pelaksanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, sehingga pembangunan aparatur pemerintah senantiasa diarahkan kepada kualitas layanan terhadap masyarakat.

Selanjutnya sebagai upaya menyukseskan kebijakan Otonomi Daerah, yaitu memberdayakan potensi daerah secara optimal demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, maka kualitas Pengawasan pada Aparatur Pemerintah memegang peranan strategis dan menjadi kunci dari pelaksanaan Otonomi Daerah guna memberikan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan bidang garapan masing-masing. Layanan prima, meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, serta kesamaan hak dan kewajiban.

Demikian pula dengan Kantor Camat Ligung Kabupaten Majalengka harus mampu memberikan kualitas layanan prima guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka, bahwa Kantor Kecamatan Ligung merupakan kantor yang bidang tugasnya bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan layanan dalam urusan penyelenggaraan administrasi publik yang mencakup wilayah Kecamatan Ligung.

Dalam bentuk upaya layanan administrasi publik seperti pembuatan E-KTP ,daerah sekitarnya yang menjadi tugas wewenang Kantor Kecamatan Ligung adalah melayani masyarakat daerah sekitarnya yang membutuhkan layanan administrasi yang cepat, tepat dan tanggap dalam pembuatan e-ktp. Tujuannya adalah untuk menekankan para pegawai Kantor Kecamatan Ligung agar lebih prima dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam pembuatan e-ktp.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penyusun lakukan, diperoleh gambaran bahwa efektivitas pelayanan dalam pembuatan e-ktp belum optimal. Hal ini terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Masih kurang optimal pelayanan dalam pembuatan e-ktp
2. Masih adanya keluhan masyarakat atas pelayanan dalam pembuatan e-ktp yaitu dalam segi waktu dan pengetikan.
3. Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur penyelenggaraan e-ktp kepada masyarakat.

Permasalahan tersebut di atas diduga akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh camat dalam pencapaian efektivitas pelayanan dalam pembuatan e-ktp belum optimal. Hal ini

terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Camat terhadap pegawai kurang fleksibel.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Camat kurang bersifat ekonomis.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh Camat kurang dimengerti

Rumusan Masalah

Agar tidak terjadi penganalisisan yang salah, baik secara teori maupun praktik dalam penelitian ini dan berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh oleh Camat dalam upaya meningkatkan Efektivitas pelayanan pembuatan e-ktp di kantor camat ligung.
2. Bagaimana hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh oleh Camat dalam upaya meningkatkan Efektivitas pelayanan pembuatan e-ktp di kantor camat ligung.
3. Bagaimana usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh Camat dalam upaya meningkatkan Efektivitas pelayanan pembuatan e-ktp di kantor camat ligung.

Tujuan

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh oleh Camat dalam upaya meningkatkan Efektivitas pelayanan pembuatan e-ktp di kantor camat ligung.
- 2 Untuk mengetahui Hambatan-Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Camat dalam upaya meningkatkan

Efektivitas pelayanan pembuatan e-ktp di kantor camat ligung.

- 3 Untuk mengetahui Usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh Camat dalam upaya meningkatkan Efektivitas pelayanan pembuatan e-ktp di kantor camat ligung.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas atau kegiatan untuk menemukan, menerapkan tindakan - tindakan serta mengoreksi penyimpangan - penyimpangan dari aktivitas - aktivitas yang direncanakan. Adalah wajar apabila terdapat adanya kekeliruan - kekeliruan tertentu, kegagalan - kegagalan dan petunjuk - petunjuk yang tidak efektif sehingga terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan daripada tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu pengawasan mempunyai tujuan yang bersifat positif, artinya harus mengusahakan terjadinya hal - hal tertentu untuk mencapai tujuan dalam batas - batas penghalang atau melalui aktivitas - aktivitas yang direncanakan.

Pengawasan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan seorang atau pegawai yang sedang melaksanakan pekerjaan, melainkan untuk membimbing para pegawai, apabila terjadi atau diketahui adanya suatu penyimpangan serta penyelewengan. Dengan dilakukannya pengawasan akan segera dapat diarahkan kembali sesuai dengan rencana, instruksi - instruksi dan kebijaksanaan - kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Dalam hal ini pengawasan sangat penting bagi seorang pemimpin dan harus dilakukan oleh setiap pemimpin dalam melaksanakan semua pekerjaan atau kegiatan, karena dikhawatirkan akan



terjadi penyimpangan - penyimpangan, maka setiap pemimpin harus segera dapat mengambil langkah - langkah atau tindakan - tindakan perbaikan kearah yang lebih baik.

Pengertian pengawasan menurut para ahli, antara lain menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya "Filsafat Administrasi" memberikan batasan pengertian pengawasan sebagai berikut :

"Pengawasan ialah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya". (2003 : 135)

Pengertian pengawasan menurut Schermerhorn (2002) yang dikutip oleh Ernie Tisnawati Sule Kurniawan Saefullah dalam bukunya "Pengantar Manajemen" yaitu sebagai berikut :

Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. (Controlling is the process of measuring performance and taking action to insure desired result)". (2004 : 317)

Pengertian Pengawasan menurut Robert J. Mockler yang dikutip oleh T.Hani Handoko dalam bukunya "Manajemen edisi ke 2" mengemukakan pengawasan sebagai berikut :

"Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan - tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik,

membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan - penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan". (2011 : 361)

Berdasarkan pendapat - pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pengawasan merupakan serangkaian kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk mengetahui kesulitan - kesulitan dan hambatan - hambatan yang dialami oleh bawahan. Kemudian apabila terdapat kesalahan dan penyimpangan segera diambil tindakan perbaikan agar pelaksanaan tugas tidak menyimpang dari ketentuan atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya fungsi pengawasan disini yaitu sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama yang dilakukan oleh pimpinan yang memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan organisasinya.

Dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan Soewarno Handyaningrat dalam bukunya "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen" mengemukakan sebagai berikut :

- (1) Memepertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan

pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

- (3) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- (4) Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan. (1981 : 144)

Adapun tujuan dari pengawasan sebagaimana dikemukakan oleh Soewarno Handyaningrat dalam bukunya "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen" yaitu :

"Pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan, jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya. Sedangkan tujuan pengawasan adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya". (1981 : 143)

Dari maksud dan tujuan pengawasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, dapat dimengerti bahwa untuk mencapai hasil daripada pelaksanaan tugas agar sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan yaitu untuk menghindari kesalahan - kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, sehingga dengan

demikian pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap penyelenggaraan tugas pekerjaan bukanlah bermaksud untuk mencari kesalahan - kesalahan yang dilakukan oleh para pelaksana atau penyelenggara, melainkan untuk meluruskan dan memperbaiki pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, guna mencapai hasil pekerjaan yang sesuai dengan rencana kebijaksanaan.

Agar pelaksanaan pengawasan mendapatkan hasil yang optimal, dalam arti hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana, perintah dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka seorang pimpinan organisasi dalam melaksanakan pengawasannya harus berpedoman pada prinsip - prinsip pengawasan sebagaimana dikemukakan oleh M. Manullang dalam bukunya "Dasar-Dasar Manajemen", yaitu sebagai berikut :

- (1) Dapat merefleksikan sifat - sifat dan kebutuhan - kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi.
- (2) Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan - penyimpangan.
- (3) Fleksibel.
- (4) Ekonomis.
- (5) Dapat dimengerti.
- (6) Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif. (2001 : 174)

Untuk lebih jelasnya mengenai prinsip - prinsip pengawasan tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pengawasan merefleksikan sifat - sifat dan kebutuhan - kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi

Dalam proses pengawasan hendaknya pimpinan organisasi mampu melakukan pengawasan yang sesuai

dengan sifat - sifat dan kebutuhan - kebutuhan dari pelaksanaan pekerjaan yang sedang diawasi. Jadi seorang pimpinan organisasi harus berusaha untuk mengetahui akan sifat - sifat serta kebutuhan - kebutuhan individu maupun unit-unit kerja yang ada dalam organisasinya, sehingga dengan usaha demikian akan menunjang ke arah peningkatan hasil kerja pegawai organisasi, seperti memperhatikan kebutuhan pegawainya sesuai dengan pekerjaannya dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari pekerjaan bawahan.

2) Dapat dengan segera melaporkan Penyimpangan - penyimpangan.

Dalam proses pengawasan hendaknya pimpinan organisasi dapat menemukan penyimpangan - penyimpangan dari pelaksanaan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, tetapi dalam arti bukan untuk berusaha mencari - mencari kesalahan bawahannya, jadi harus dilakukan secara objektif . Apabila terjadi adanya penyimpangan, maka pimpinan organisasi harus segera melakukan tindakan perbaikan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan (program kerja) serta berusaha memberikan penjelasan tentang dampak negatif dari penyimpangan tersebut, agar bawahan mampu memahami akan kesalahan serta tidak mengulangi pada pekerjaan yang sama di kemudian hari. Melalui usaha demikian, maka dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa disiplin dan tanggungjawab pada diri para bawahan dalam setiap pelaksanaan tugasnya, sehingga dapat meningkatkan hasil kerja ke arah yang optimal.

3). Fleksibel.

Dalam proses pengawasan hendaknya seorang pimpinan organisasi berusaha untuk tidak menimbulkan adanya kekakuan dalam proses pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para bawahan. Oleh karena itu pimpinan organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi dari suatu proses pelaksanaan pekerjaan yang sedang diawasi, namun bukan berarti ikut - ikutan. Dengan kata lain pengawasan yang dilakukan pimpinan organisasi seharusnya menumbuhkan adanya keterbukaan dan menciptakan suasana yang dinamis sehingga proses pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para bawahan dapat dicapai hasil yang optimal dari pelaksanaan pekerjaan tersebut.

4). Ekonomis.

Dalam proses pengawasan hendaknya seorang pimpinan organisasi berusaha untuk menentukan batasan dari penggunaan sumber dana dan sumber daya yang diperlukan, dibandingkan dengan hasil kerja yang hendak dicapai. Dengan kata lain hasil kerja harus lebih besar dibandingkan dengan penggunaan dana dan sumber daya yang dikeluarkan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pemborosan. Guna menghindari pemborosan, maka pimpinan organisasi seharusnya berusaha untuk menentukan rasionalisasi (Melakukan perbandingan secara rasional) dalam penentuan penggunaan dana dan tenaga serta mampu menentukan standar efisiensi dalam setiap proses pekerjaan yang dilakukan oleh para bawahan, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugasnya oleh para bawahan.

5). Dapat dimengerti.

Dalam proses pengawasan hendaknya seorang pimpinan organisasi



berusaha untuk memberikan penjelasan tentang tugas dan fungsi dari masing - masing individu maupun unit-unit kerja, sehingga akan terwujud adanya ketertibahn di dalam pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi karena setiap individu memahami tentang tugas dan fungsi masing - masing. Dengan demikian akan menumbuhkan adanya sikap disiplin dan tanggungjawab bagi setiap individu dalam pelaksanaan tugas masing - masing. Di samping itu akan terwujud adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas organisasi secara keseluruhan.

- 6). Dapat menjamin tindakan – tindakan korektif.

Dalam proses pengawasan hendaknya seorang pimpinan organisasi berusaha untuk mewujudkan adanya kegiatan yang bersifat membimbing, mengarahkan dan memperbaiki segala sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maupun dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Hal ini bisa diwujudkan dengan melakukan tindakan-tindakan korektif yang sesuai dengan rencana, apabila terjadi suatu penyimpangan - penyimpangan dengan memberikan sanksi secara adil dengan menekankan tentang pentingnya pengawasan melekat.

Dari uraian - uraian tentang prinsip-prinsip pengawasan tersebut, maka dapat ditarik suatu simpulan bahwa penguasaan tentang prinsip - prinsip pengawasan oleh seorang pimpinan organisasi merupakan modal utama dalam melaksanakan pengawasan, sehingga pelaksanaan pekerjaan para bawahan akan mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan rencana, perintah dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan

sebelumnya di dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk mengetahui kesulitan - kesulitan dan hambatan - hambatan yang dialami oleh bawahan. Kemudian apabila terdapat kesalahan dan penyimpangan segera diambil tindakan perbaikan agar pelaksanaan tugas tidak menyimpang dari ketentuan atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan secara teoritis, pengawasan merupakan fungsi pimpinan yang sangat fundamental (pokok) sifatnya, sehingga pemimpin memiliki peranan yang besar dalam proses pengawasan. Namun demikian, bukan berarti mendominasi semua kegiatan pengawasan, yang dimaksud memiliki peranan besar disini adalah seorang pimpinan harus mampu menggerakkan bawasanya agar melaksanakan pekerjaan dengan sebaik - baiknya melalui bimbingan dan pengarahan yang terus menerus.

Dalam prakteknya, penunjang utama dari proses pengawasan adalah komunikasi. Semakin baik komunikasi yang diciptakan oleh seorang pimpinan, akan semakin baik pula pengawasan yang berjalan di organisasi yang bersangkutan, seperti yang dikemukakan oleh Soewarno Handyaningrat dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Adminstrasi dan Manajemen” yaitu :

“Salah satu yang menjadi penghalang adalah proses komunikasi yang memungkinkan pengawasan itu berlangsung, sehingga komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam

pengawasan sebagai usaha mencapai tujuan pengawasan tersebut". (1981 : 151)

Di samping itu kemampuan berkomunikasi, dalam melaksanakan pengawasan seorang pimpinan harus mengetahui persyaratan pengawasan yang diperlukan. Tujuannya adalah agar memperoleh sistem pengawasan yang memadai dan efektif untuk membantu agar apa yang dilakukan sesuai dengan rencana, seperti yang dikemukakan oleh Soewarno Handyaningrat tentang syarat - syarat pengawasan yang efektif, dalam bukunya "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen" yaitu :

1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang.
2. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya.
3. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan - penyimpangan pada hal - hal yang penting.
4. Pengawasan harus objektif.
5. Pengawasan harus luwes (fleksibel).
6. Pengawasan harus hemat.
7. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan. (1981 : 151)

Dengan memperhatikan persyaratan - persyaratan yang efektif tersebut, maka proses pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Secara teoritis, Pengertian efektivitas banyak dikemukakan oleh para ahli dengan rumusan yang berbeda. Namun pada intinya, istilah efektif selalu berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Mahmudi dalam bukunya "Manajemen Kinerja Sektor Publik", menyatakan efektivitas sebagai berikut :

"Efektivitas adalah terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan". (2013 : 86)

Sedangkan menurut Makmur dalam bukunya "Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan" yaitu :

"Efektivitas dapat kita katakan sebagai ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Sedangkan kegiatan yang tidak efektif adalah kegiatan yang selalu mengalami kesenjangan antara harapan, implementasi dengan hasil yang dicapai". (2010 : 6)

Dan selanjutnya pengertian Efektivitas yang dikemukakan oleh Ibrahim Lubis dalam bukunya "Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen":

"Efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu dalam menggunakan sumber daya dan dana yang efektif dan efisien". Dengan mengacu pada Indikator dalam pelaksanaan kerja yang efektif, yaitu "Efektivitas kerja berarti bahwa segala sesuatu dilaksanakan dengan berdaya guna yang berarti tepat, cepat, hemat, dan selamat".

1. Tepat
2. Cepat

3. Hemat

4. Selamat (1985: 33)

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator - indikator Efektivitas kerja pegawai tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tepat

ialah apa yang dikehendaki tercapai, kena sasaran, memenuhi target, dan apa yang dicita-citakan menjadi realita, yang mengartikan bahwa dalam mencapai efektivitas kerja pegawai harus tepat seperti rencana dapat dilaksanakan dan target pekerjaan tercapai

b. Cepat

ialah sebelum waktu yang ditetapkan pekerjaan tersebut telah selesai, seperti pekerjaan selesai sebelum dengan waktu yang ditetapkan dan pekerjaan selesai pada waktunya.

c. Hemat

ialah dengan biaya sekecil - kecilnya memperoleh apa yang diharapkan tanpa terjadi pemborosan dalam bidang apa pun, seperti sesuai dengan anggaran dan menekan tingkat kebocoran (pemborosan).

d. Selamat

ialah segala sesuatu sampai pada tujuan yang dimaksud tanpa mengalami hambatan hambatan, seperti tanpa mengalami hambatan dan tujuan tercapai sesuai dengan rencana.

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas merupakan keadaan dimana suatu pelaksanaan kegiatan telah tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, tanpa menguraikan bagaimana cara pencapaiannya.

Dan adapun pengertian mengenai pelayanan pembuatan e-ktip, yaitu menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata pelayan dan berakhir-an,

yaitu suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang atau petugas dalam melayani orang lain secara tepat dan memuaskan dalam suatu bidang atau suatu kebutuhan tertentu (dalam pembuatan e-ktip). (1982 : 726)

Dalam teori administrasi, antara pengawasan dengan efektivitas terdapat hubungan yang erat, karena merupakan salah satu fungsi manajemen dalam upaya mencapai tujuan. Dalam suatu organisasi, semua aktivitas diarahkan kepada upaya pencapaian tujuan yang memerlukan pengawasan yang berkesinambungan. Serangkaian aktivitas tersebut digerakan oleh seorang manajer atau pimpinan, yang di dalamnya terdapat fungsi pengawasan. Soewarno Handayani dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen", mengemukakan bahwa :

"Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak-sesuaian, penyelewengan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orang, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan." (1981 : 143)

Eratnya hubungan pengawasan efektivitas pelayanan dalam pembuatan e-ktip, dijelaskan juga oleh Handayani, bahwa : "Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya". Hal ini sejalan dengan Winardi dalam bukunya "Asas - Asas Manajemen" yang menyatakan bahwa :

”Fungsi manajemen ketiga adalah pengawasan (controlling). Fungsi tersebut mencakup semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upayanya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. (1983 : 585)

Berdasarkan kutipan - kutipan diatas peneliti beranggapan bahwa antara pengawasan dengan tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau instansi erat sekali, sehingga dapat dijadikan alasan guna pelaksanaan penelitian terhadap masalah tersebut. Demikian juga halnya pada Kantor Camat Ligung, pengawasan memiliki kedudukan penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti pada Kantor Camat Ligung Kabupaten Majalengka adalah penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan kepemimpinan dalam hubungannya dengan kinerja pegawai, sebagaimana Meleong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (2010: 9) Selanjutnya Sugiyono menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, dan hasil penelitian kualitatif lebih

menekankan makna dari pada generalisasi. (2011:15),

Jenis Data dan Informasi

Data Primer

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian⁴. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang kepemimpinan Camat dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Camat Banjaran Kabupaten Majalengka.

Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, hasil survey, studi histories, dan sebagainya. Peneliti juga menggunakan data sekunder berupa hasil angket yang disebarkan kepada pegawai Kantor Camat untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui data primer yang terkait dengan masalah penelitian. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Glaser dan Strauss yang dikutip Moleong dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif” bahwa

“ dalam banyak hal kedua bentuk data baik kualitatif maupun kuantitatif diperlukan, bukan kuantitatif menguji kualitatif , melainkan kedua bentuk tersebut digunakan bersama.” (22 :2001)

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penyusun menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- (a) Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis dengan tujuan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan sasaran penelitian.
- (b) Studi lapangan, meliputi :
 - (1) Wawancara berstruktur, yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terpadu secara langsung kepada responden yang cukup memiliki data, yaitu : Camat Ligung.
 - (2) Observasi non partisipan, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, tanpa melibatkan diri kapada kegiatan yang sedang berlangsung dengan maksud untuk mengetahui selengkap mungkin mengenai permasalahan yang terdapat dalam obyek penelitian.
 - (3) Angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya kepada responden.

Analisis Data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik modus,

yaitu suatu cara analisis dengan mengambil jawaban yang paling banyak. Dalam arti untuk menganalisis data, baik dari variabel bebas maupun terikat, penyusun hanya memfokuskan pada pilihan dari alternatif jawaban yang dipilih oleh responden, dimana yang paling banyak merupakan acuan untuk menganalisis data tersebut, yang hasilnya berbentuk prosentase.

Mengenai teknik modus yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat dari Nurkancana yang di unduh dari www.infopenelitian.com, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{N} \times 100$$

Keterangan :

P = Prosentase Jumlah Responden Yang Memberikan Jawaban

f = Frekuensi Responden Yang Memberikan Jawaban

n = Jumlah Yang Dijadikan Responden

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengawasan Oleh Camat Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Pembuatan E-KTP di Kantor CamatLigung.

Untuk membahas mengenai pengawasan Camat dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan pembuatan e-ktp di Kantor Camat Ligung, penulis menyebarkan angket kepada semua pegawai 24 orang dan melakukan wawancara kepada 1orang yaitu Camat Ligung.

Mengenai penarikan responden, penulis menggunakan metode teknik total sampling yaitu dimana semua populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan responden dalam Observasi,

sehingga semua pegawai di Kantor Camat Ligung dijadikan sampel, kecuali Camat.

Dalam melakukan pembahasan mengenai pengawasan Camat dalam upaya meningkatkan efektifitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung, penulis menyebarkan angket menyangkut pelaksanaan pengawasan Camat yang didasarkan kepada prinsip-prinsip pengawasan, yaitu sebagai berikut :

- (1) Dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi.
- (2) Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
- (3) Fleksibel.
- (4) Ekonomis.
- (5) Dapat dimengerti.
- (6) Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Kemudian untuk melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil Observasi ini penulis berpedoman kriteria pengukuran analisis data yang dikemukakan oleh Arikunto dalam buku "Prosedur Observasi Suatu Pendekatan Praktik".

Penentuan nilai pada tabel tersebut di atas, didasarkan atas asumsi persentase tanggapan responden berkaitan erat dengan usaha Camat dalam prinsip-prinsip pengawasan dan pengaruhnya terhadap tingkat efektifitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung, yang akan tercermin dalam empat kriteria predikat.

Berikut penulis akan menguraikan mengenai pengawasan Camat dalam upaya meningkatkan efektifitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung, ditinjau dari setiap penerapan dari prinsip-prinsip pengawasan tersebut.

Di bawah ini penulis akan bahas mengenai pengawasan Kantor Camat

Ligung, ditinjau dari setiap prinsip pengawasan tersebut di atas.

- 1). Pengawasan merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi

Dalam proses pengawasan hendaknya pimpinan organisasi mampu melakukan pengawasan yang mencerminkan dan sesuai dengan sifat-sifat serta kebutuhan-kebutuhan dari pelaksanaan pekerjaan yang sedang diawasi. Jadi seorang pimpinan organisasi harus berusaha untuk mengetahui akan sifat-sifat serta kebutuhan-kebutuhan individu maupun unit-unit kerja yang ada dalam organisasinya, sehingga dengan usaha demikian akan menunjang ke arah peningkatan hasil layanan.

1. Mengetahui sifat-sifat pekerjaan.

Efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung dapat meningkat, apabila dalam pelaksanaan pengawasan Camat berusaha untuk mengetahui tentang sifat-sifat pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawainya, sehingga dalam pengerahan tenaga maupun sumber daya lainnya sesuai dengan sifat dari pekerjaan tersebut.

2. Memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan pekerjaan.

Meningkatnya

efektifitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung, sangat tergantung kepada usaha Camat di dalam memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan pekerjaan pegawainya, sehingga dengan dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut akan mendorong pegawai lebih bergairah dalam pelaksanaan kerjanya yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap meningkatnya efektifitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

3. Menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari pekerjaan bawahan.

Jika dalam pelaksanaan pengawasan Camat berusaha menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari pekerjaan bawahan, maka para pegawai akan merasakan motivasi untuk lebih taat dan patuh terhadap ketentuan pelaksanaan pengawasan Camat berusaha tidak menimbulkan adanya kecanggungan dan kekakuan terhadap proses kerja yang sedang dilakukan. Dengan sendirinya hal ini akan mendorong meningkatnya hasil kerja yang dilakukan, sehingga efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung dapat meningkat.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut di atas, maka dapat diketahui mengenai penerapan tiga sub variabel dari prinsip-prinsip pengawasan merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi oleh Camat, yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui sifat-sifat pekerjaan

Sebanyak 14 orang responden (58,33%) menyatakan bahwa Camat selalu berusaha untuk mengetahui sifat-sifat pekerjaan bawahan, sedangkan sebanyak 7 orang responden (29,17%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang berusaha untuk mengetahui sifat-sifat pekerjaan bawahan dan sisanya 3 orang responden (12,5%) menyatakan bahwa Camat tidak berusaha untuk mengetahui sifat-sifat pegawai.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut, maka dapat diketahui bahwa Camat di dalam proses pengawasannya telah berusaha dengan cukup baik untuk mengetahui sifat-sifat pekerjaan bawahannya, sehingga para pegawai merasa termotivasi untuk lebih bersemangat di dalam pelaksanaan

pekerjaannya, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa untuk mengetahui sifat-sifat pekerjaan bawahan pada dasarnya telah diusahakan, yaitu dengan turut serta melakukan kegiatan operasional, tetapi belum sepenuhnya dikarenakan terbatasnya waktu.

Melalui observasi ternyata dalam kegiatan operasional tertentu Camat turut terlibat, sehingga para pegawai merasa termotivasi untuk benar-benar melakukan tugas sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku.

2. Memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari pekerjaan.

Sebanyak 17 orang responden (70,83%) menyatakan bahwa Camat selalu berusaha memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari pekerjaan bawahan, sedangkan sebanyak 3 orang (12,5%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang berusaha memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pekerjaan bawahan, dan sebanyak 4 orang responden (16,67%) menyatakan bahwa Camat tidak berusaha memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pekerjaan bawahannya.

Memperhatikan tanggapan responden tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam proses pengawasan, ternyata Camat belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pekerjaan bawahannya, sehingga berpengaruh terhadap masih rendahnya tingkat efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung dan tanggung jawab pegawai, dan pada akhirnya akan menghambat terhadap meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pekerjaan bawahannya ternyata masih mendapat hambatan berupa terbatasnya dana, sehingga kebutuhan akan fasilitas untuk mencapai efektivitas kerja pegawai belum sepenuhnya dipenuhi.

Dan melalui observasi terbukti bahwa Camat sudah semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan pegawai namun terhambat oleh dana.

3. Menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari pekerjaan.

Sebanyak 15 orang responden (62,5%) menyatakan bahwa Camat selalu berusaha menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari pekerjaan bawahannya, sedangkan sebanyak 5 orang responden (20,83%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang berusaha menyesuaikan dengan situasi dan kondisi bawahannya, dan ada responden (16,67%) menyatakan bahwa Camat tidak berusaha menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi dari pekerjaan bawahannya.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam proses pengawasan, ternyata Camat belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi dari pekerjaan bawahannya, sehingga menghambat meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung. Melalui wawancara dengan Camat diperoleh penjelasan bahwa untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari pekerjaan bawahannya, ternyata masih mendapat hambatan berupa terbatasnya waktu, terutama dalam kegiatan operasional.

Dari hasil Observasi dihasilkan, ternyata masih kurangnya usaha

Camat dalam menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi dari pekerjaan bawahannya. Hal ini berakibat rendahnya semangat kerja dan rendahnya tingkat efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penerapan prinsip pengawasan merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan yang diawasi, ternyata baru mencapai nilai rata-rata sebesar 63,87%. Hal ini menunjukkan bahwa Camat belum sepenuhnya berusaha dalam penerapan prinsip pengawasan tersebut, sehingga baru mencapai predikat cukup baik. Kondisi demikian jelas akan menghambat dalam mewujudkan adanya rasa disiplin dan aktif serta tanggung jawab yang tinggi pada diri setiap pegawai yang pada akhirnya akan menghambat dalam meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

2). Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.

Dalam proses pengawasan hendaknya pimpinan organisasi dapat menemukan penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, tetapi dalam arti bukan untuk berusaha mencari-mencari kesalahan bawahannya, jadi harus dilakukan secara objektif. Apabila terjadi adanya penyimpangan, maka pimpinan organisasi harus segera melakukan tindakan perbaikan dan berusaha memberikan penjelasan tentang dampak negatif dari penyimpangan tersebut, agar bawahannya mampu memahami akan kesalahan dan tidak mengulangi pada pekerjaan yang sama di kemudian hari. Melalui usaha demikian, maka dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa aktif

dan tanggungjawab pada diri para bawahan dalam setiap pelaksanaan tugasnya, sehingga dapat meningkatkan hasil kerja ke arah yang optimal.

1. Menemukan penyimpangan-penyimpangan dengan objektif

Terciptanya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktp di Kantor Camat Ligung, sangat tergantung kepada kemampuan dari Camat untuk menentukan penyimpangan secara objektif. Karena melalui cara ini akan membuat para pegawainya mempunyai penilaian yang sama terhadap pimpinannya. Hal ini akan mendorong meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktp di Kantor Camat Ligung.

2. Mengadakan tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan.

Keberhasilan pelaksanaan pengawasan dalam upaya mencapai efektivitas kerja pegawai pada Kantor Camat Ligung, ditentukan oleh kemampuan Camat dalam mengadakan perbaikan terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan tersebut, sehingga akan mendorong para pegawai untuk lebih memperhatikan rencana kerja yang telah ditentukan, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan (program kerja).

Meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktp di Kantor Camat Ligung, sangat tergantung kepada usaha Camat untuk melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan, karena dari pelaksanaan pekerjaan yang lalu, akan membantu dalam penyusunan program kerja selanjutnya, khususnya untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan

tersebut. Dengan jalan seperti ini, maka diharapkan akan tercipta kepatuhan para pegawai dalam pelaksanaan kerjanya, dalam arti selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan pembuatan e-ktp di Kantor Camat Ligung

Dari tanggapan responden tersebut di atas, maka dapat diketahui mengenai usaha Camat dalam menerapkan dari tiga sub variabel dari prinsip dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan, yaitu sebagai berikut :

1. Menemukan penyimpangan-penyimpangan dengan objektif.

Sebanyak 14 orang responden (58,33%) menyatakan bahwa Camat selalu berusaha menemukan penyimpangan secara objektif, sedangkan sebanyak 7 orang responden (29,17%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang berusaha menemukan penyimpangan secara objektif, dan sebanyak 3 orang responden (12,5%) responden menyatakan bahwa Camat tidak berusaha menemukan penyimpangan secara obyektif.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam proses pengawasan, ternyata Camat belum sepenuhnya berusaha secara optimal untuk menemukan penyimpangan secara objektif, sehingga para pegawai belum merasa termotivasi untuk senantiasa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, karena merasa diperlakukan kadang-kadang secara adil. Pada akhirnya akan berpengaruh terhadap terhambatnya peningkatan efektivitas pelayanan pembuatan e-ktp di Kantor Camat Ligung.

Melalui wawancara diperoleh keterangan bahwa Camat dalam

pelaksanaan pengawasan senantiasa berusaha menemukan penyimpangan secara objektif, namun dikarenakan masih adanya perbedaan individu dalam pengetahuan dan kemampuan, maka masih terjadi salah penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku, sehingga masih ada yang merasa diperlakukan kadang-kadang objektif

Berdasarkan observasi, nampak dalam proses pengawasan Camat belum sepenuhnya bertindak obyektif di dalam menerapkan peraturan dan ketentuan. Hal ini membuat para pegawai merasa diperlakukan tidak sama, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaannya terlihat kadang-kadang bergairah. Misalnya pemberian teguran serta sanksi belum sepenuhnya dilakukan terhadap adanya suatu penyimpangan dalam proses pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai.

2. Mengadakan tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan.

Sebanyak 10 orang responden (41,66%) menyatakan bahwa Camat selalu berusaha mengadakan tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan, sedangkan sebanyak 7 orang responden (29,17%) responden menyatakan bahwa Camat kadang-kadang berusaha mengadakan tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan, dan sebanyak 7 orang responden (29,17%) menyatakan bahwa Camat tidak berusaha mengadakan tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan.

Dari hasil tanggapan responden tersebut di atas, maka dapat diketahui dalam pelaksanaan pengawasannya, ternyata Camat telah berusaha dengan cukup baik untuk mengadakan tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan, sehingga dengan sendirinya akan

berpengaruh terhadap meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung dalam pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan wawancara diperoleh keterangan bahwa tindakan perbaikan selalu diupayakan terhadap suatu penyimpangan, agar para pegawai dapat mengetahui cara pelaksanaan kerja yang sesuai dengan rencana dan tidak melakukan penyimpangan yang sama pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

Melalui observasi diperoleh hasil, ternyata tindakan perbaikan telah diusahakan oleh Camat. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan hasil kerja dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Kantor Camat Ligung.

3. Melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan.

Sebanyak 17 orang responden (70,83%) menyatakan bahwa Camat selalu berusaha melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan, sedangkan sebanyak 3 orang responden (12,5%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang berusaha melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan, dan sebanyak 4 orang responden (16,67%) menyatakan bahwa Camat tidak berusaha melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, ternyata Camat belum sepenuhnya berusaha untuk melakukan evaluasi terhadap setiap program kerja yang telah dilaksanakan, sehingga para pegawai kadang-kadang mengetahui setiap kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Hal ini jelas akan

mempengaruhi peningkatan hasil kerja secara optimal di masa yang akan datang dan dengan sendirinya akan menghambat dalam meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa evaluasi belum sepenuhnya dilakukan terhadap seluruh bidang kerja, dikarenakan masih adanya keterbatasan waktu dan adanya sebagian pegawai yang kadang-kadang disiplin dalam penyampaian laporan sebagai bahan untuk evaluasi namun masih ada yang terlambat, maka efektivitas dari hasil evaluasi belum sepenuhnya tercapai.

Dari hasil observasi, nampak masih terdapat keterlambatan penyampaian laporan dari pegawai, sehingga menghambat pelaksanaan evaluasi.

Berdasarkan uraian-uraian tentang penerapan tiga sub variabel dari prinsip dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan, maka dapat diketahui bahwa Camat baru mencapai predikat cukup baik di dalam penerapan prinsip tersebut. Hal ini terlihat dari pencapaian nilai dari penerapan tiga sub variabel dari prinsip segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan, yaitu baru mencapai sebesar 56,94%. Dengan kondisi demikian, maka akan berpengaruh terhadap terwujudnya peningkatan disiplin dalam layanan, sehingga mampu meningkatkan hasil yang optimal, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

3). Fleksibel.

Dalam proses pengawasan hendaknya seorang pimpinan organisasi berusaha untuk tidak menimbulkan

adanya kekakuan dalam proses pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para bawahan. Oleh karena itu pimpinan organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi dari suatu proses pelaksanaan pekerjaan yang sedang diawasi, namun bukan berarti ikut-ikutan. Dengan kata lain pengawasan yang dilakukan pimpinan organisasi seharusnya tidak mengganggu proses pekerjaan yang sedang dilakukan oleh para bawahan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dari pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Berhasil atau tidaknya dalam meningkatkan efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung, sangat bergantung kepada usaha Camat dalam menerapkan prinsip fleksibel proses pengawasan, yaitu berusaha menumbuhkan adanya keterbukaan serta menciptakan suasana kerja yang dinamis.

Untuk mengetahui sampai sejauhmana usaha Camat dalam menerapkan prinsip fleksibel, maka penulis melakukan Observasi terhadap tiga sub variabel dari dari prinsip tersebut di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu pekerjaan bawahan.

Jika Camat dalam pengawasannya berusaha menjelaskan tujuan dari pengawasan serta manfaat terhadap kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka dia telah berhasil untuk tidak mengganggu jalannya pekerjaan bawahan.

2. Menumbuhkan adanya keterbukaan.

Meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung, sangat tergantung pada usaha Camat dalam menumbuhkan adanya keterbukaan melalui komunikasi

dua arah, sehingga akan menumbuhkan adanya sikap saling percaya, saling menghormati dalam pelaksanaan pekerjaan, dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

3. Menciptakan suasana kerja yang dinamis

Pelaksanaan pengawasan akan berhasil dengan maksimal dalam arti meningkatkan efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung, apabila Camat berusaha menciptakan suasana kerja yang dinamis, yaitu tidak adanya kekakuan di antara yang diawasi dengan pengawas, sehingga tidak mengganggu proses kerja yang sedang dilakukan.

Dari tanggapan responden tersebut di atas, maka dapat diketahui mengenai penerapan dari tiga sub variabel dari prinsip fleksibel, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya pekerjaan bawahan.

Sebanyak 13 orang responden (54,17%) menyatakan bahwa Camat selalu berusaha untuk tidak mengganggu jalannya pekerjaan bawahan, sedangkan sebanyak 8 orang responden (33,33%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang berusaha untuk tidak mengganggu jalannya pekerjaan bawahan, dan sebanyak 3 orang responden (12,5%) menyatakan bahwa Camat tidak berusaha untuk tidak mengganggu jalannya pekerjaan bawahan.

Dari tanggapan reponden tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam proses pengawasan, ternyata Camat telah berusaha dengan cukup baik untuk tidak mengganggu jalannya pekerjaan bawahan, sehingga dapat menambah motivasi para pegawai dalam

melaksanakan pekerjaannya, sehingga terwujud dalam meningkatkan efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan selalu diusahakan untuk tidak mengganggu pekerjaan bawahan, melalui upaya pemberian penjelasan tentang pentingnya proses pengawasan serta tujuannya sehingga akan tercipta kelancaran pelaksanaan pekerjaan pegawai.

Melalui Observasi diperoleh hasil, bahwa Camat selalu berusaha untuk menjelaskan tentang tujuan pengawasannya, sehingga mendorong para pegawai lebih bergairah lagi dalam pelaksanaan pekerjaannya, dalam arti menantiasa memperhatikan prosedur kerja yang telah ditetapkan.

2. Menumbuhkan adanya keterbukaan.

Sebanyak 17 orang responden (70,83%) menyatakan bahwa Camat selalu berusaha menumbuhkan adanya keterbukaan dalam pelaksanaan pengawasannya, sedangkan sebanyak 4 orang responden (16,67%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang berusaha menumbuhkan adanya keterbukaan dalam pelaksanaan pengawasannya, dan sebanyak 3 orang responden (12,5%) menyatakan bahwa Camat tidak berusaha menumbuhkan adanya keterbukaan dalam pelaksanaan pengawasan.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam proses pengawasan, ternyata Camat telah berusaha dengan cukup baik dalam menumbuhkan adanya keterbukaan, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan tercipta adanya rasa saling percaya dan

saling pengertian di antara para pegawai. Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan hasil kerja secara keseluruhan, sehingga akan mengarah pada meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa di lingkungan tempat bekerja selalu diusahakan adanya saling pengertian dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu melalui proses komunikasi dua arah, sehingga dapat terwujud adanya kerja sama yang baik dalam meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

Melalui hasil Observasi diperoleh bukti bahwa dengan adanya keterbukaan, maka kerja sama antara para pegawai terlihat semakin baik, sehingga dapat meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung secara keseluruhan.

3. Menciptakan suasana kerja yang dinamis.

Sebanyak 13 orang responden (54,17%) menyatakan bahwa Camat selalu berusaha menciptakan suasana kerja yang dinamis, sedangkan sebanyak 5 orang responden (20,83%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang berusaha untuk menciptakan hubungan kerja yang dinamis dan sisanya sebanyak 6 orang responden (25%) menyatakan bahwa Camat tidak berusaha untuk menciptakan suasana kerja yang dinamis.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut di atas, maka dapat diketahui Camat dalam pelaksanaan pengawasan, ternyata telah berusaha dengan cukup baik dalam menciptakan adanya suasana kerja yang dinamis, sehingga para pegawai dalam pekerjaannya termotivasi untuk meningkatkan daya kreativitas. Hal ini

jelaskan menunjang terhadap peningkatan hasil kerjanya dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

Melalui wawancara diperoleh keterangan bahwa diakui belum sepenuhnya berusaha mewujudkan suasana kerja yang dinamis. Hal ini dikarenakan masih adanya hambatan diantara lain terbatasnya fasilitas kerja, sehingga media untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung belum sepenuhnya diperhatikan.

Dari kegiatan observasi, diperoleh hasil sebagai berikut :

Dikarenakan masih adanya keterbatasan fasilitas kerja, maka para pegawai dalam pelaksanaan tugas operasional kadang-kadang terganggu daya kretivitasnya, sehingga menghambat dalam pencapaian target kerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, yaitu tentang usaha Camat dalam menerapkan prinsip-prinsip fleksibel, ternyata dari tiga sub variabel prinsip fleksibel apabila diambil nilai rata-rata, maka diperoleh hasil sebesar 60,73%. Hal ini menunjukkan bahwa Camat baru mencapai predikat cukup baik dalam menerapkan prinsip fleksibel, sehingga akan berpengaruh terhadap pencapaian efektivitas kerja pegawai dan tanggung jawab para pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

4). Ekonomis.

Dalam proses pengawasan hendaknya seorang pimpinan organisasi berusaha untuk menentukan batasan dari

penggunaan sumber dana dan sumber daya yang diperlukan, dibandingkan dengan hasil kerja yang hendak dicapai. Dengan kata lain hasil kerja harus lebih besar dibandingkan dengan penggunaan dana serta sumber daya yang dikeluarkan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pemborosan. Guna menghindari pemborosan, maka pimpinan organisasi seharusnya berusaha untuk menentukan rasionalisasi dalam penentuan penggunaan dana dan tenaga serta mampu menentukan standar efisiensi dalam setiap proses pekerjaan yang dilakukan oleh para bawahan, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugasnya oleh para bawahan.

1. Melakukan perbandingan secara rasional.

Meningkatnya

efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung, sangat tergantung pada usaha Camat dalam melakukan perbandingan secara rasional dalam pelaksanaan pengawasan, yaitu menghitung secara rasional antara penerahan sumber dana dan sumber daya dengan hasil yang dicapai, sehingga akan tercipta efisiensi dan akan berpengaruh terhadap peningkatan hasil layanan, yang pada akhirnya akan berpengaruh positif terhadap meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

2. Menekan tingkat kebocoran (pemborosan).

Berhasilnya pelaksanaan pengawasan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung, sangat ditentukan oleh Camat dalam menekan tingkat kebocoran, baik dana maupun sumber daya lainnya sehingga pelaksanaan

pekerjaan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Menentukan standar efisiensi.

Apabila dalam pengawasan Camat berusaha untuk menentukan standar efisiensi, maka para pegawai akan mempunyai pedoman dalam pelaksanaan kerja dapat mengarah kepada tujuan yang telah ditentukan, dalam arti meningkatkan efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

Dari tanggapan responden diketahui tentang penerapan tiga sub variabel dari prinsip ekonomis oleh Camat, yaitu :

1. Melakukan perbandingan secara rasional.

Sebanyak 12 orang (50%) menyatakan bahwa Camat selalu berusaha untuk melakukan perbandingan secara rasional, sedangkan sebanyak 5 orang responden (20,83%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang berusaha untuk melakukan perbandingan secara rasional, dan sebanyak 7 orang responden (29,17%) menyatakan bahwa Camat tidak berusaha untuk melakukan perbandingan secara rasional.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, ternyata Camat belum sepenuhnya berusaha untuk melakukan perbandingan secara rasional antara penerahan sumber daya dan sumber dana dengan hasil yang dicapai, sehingga para pegawai belum memiliki suatu pedoman dalam pelaksanaan tugasnya dan pada akhirnya akan menghambat dalam meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

Melalui wawancara diperoleh keterangan, bahwa untuk melakukan perbandingan secara rasional belum sepenuhnya dilakukan, karena masih

mendapat hambatan berupa penekanan tugas pada layanan, sehingga titik beratnya adalah berusaha semaksimal mungkin memberikan layanan kepada masyarakat. Dari hasil observasi diperoleh masih adanya pelaksanaan pekerjaan yang kadang-kadang efisien, khususnya dari segi dana dan waktu.

2. Menekan tingkat kebocoran (pemborosan).

Sebanyak 13 orang responden (54,17%) menyatakan bahwa Camat selalu berusaha menekan tingkat kebocoran, sedangkan sebanyak 8 orang (33,33%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang berusaha menekan tingkat kebocoran dan sisanya sebanyak 3 orang responden (12,5%) menyatakan bahwa Camat tidak berusaha menekan tingkat kebocoran.

Dari tanggapan responden tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, ternyata Camat baru mencapai predikat kurang baik dalam usahanya untuk menekan tingkat kebocoran dalam pelaksanaan pekerjaan. Kondisi demikian akan berdampak pada penurunan tingkat efisiensi dalam proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga menghambat meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktp di Kantor Camat Ligung.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa untuk menekan tingkat kebocoran masih mendapat kendala, yaitu masih rendahnya kecakapan dan keterampilan pegawai, khususnya dalam menggunakan waktu kerja, sehingga masih terjadi adanya kebocoran dari segi penggunaan waktu kerja. Melalui observasi, nampak masih terdapat sebagian pegawai yang melakukan pemborosan dalam penggunaan waktu kerja, yaitu menunda-menunda pekerjaan.

3. Menentukan standar efisiensi.

Sebanyak 16 orang responden (66,67%) menyatakan bahwa Camat selalu berusaha menentukan standar efisiensi, sedangkan sebanyak 5 orang (20,83%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang berusaha untuk menentukan standar efisiensi dan sisanya sebanyak 3 orang responden (12,5%) menyatakan bahwa Camat tidak berusaha untuk menentukan standar efisiensi.

Memperhatikan tanggapan responden tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengawasannya Camat belum berusaha secara maksimal didalam menentukan standar efisiensi, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya para pegawai tidak mempunyai pedoman dan akhirnya akan menghambat dalam meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktp di Kantor Camat Ligung.

Melalui wawancara diperoleh keterangan bahwa untuk menentukan standar efisiensi, ternyata masih mendapat hambatan berupa masih adanya perbedaan pengetahuan dan kecakapan pegawai, sehingga masih ada perbedaan persepsi dalam penjabaran standar efisiensi.

Dari observasi, terbukti bahwa masih ada beberapa pegawai yang dalam kegiatan pekerjaannya kurang memperhatikan standar efisiensi yang telah ditetapkan. Misalnya dalam pembuatan laporan hasil kerja masih sering terjadi keterlambatan, sehingga menghambat dalam proses penentuan kebijaksanaan, karena kurang informasi dan data.

Berdasarkan uraian-uraian tentang tiga sub variabel dari prinsip ekonomis tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam proses pengawasan, ternyata Camat perlu meningkatkan lagi usahanya dalam

menerapkan prinsip ekonomis. Hal ini terlihat dari pencapaian nilai tertinggi dari tiga sub variabel prinsip tersebut baru mencapai sebesar 56.94%, sehingga baru mencapai interval yang terendah dari predikat cukup baik. Kondisi demikian jelas akan menghambat dalam meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung oleh tanggung jawab para pegawai dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga akan menghambat dalam meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

5). Dapat dimengerti.

Dalam proses pengawasan hendaknya seorang pimpinan organisasi berusaha untuk memberikan penjelasan tentang tugas serta fungsi dari masing-masing individu maupun unit-unit kerja, sehingga akan terwujud adanya ketertiban dalam pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, karena setiap individu memahami tentang tugas dan fungsi masing-masing. Dengan demikian, maka akan menumbuhkan adanya sikap disiplin dan tanggungjawab bagi setiap individu dalam pelaksanaan tugas masing-masing, di samping itu akan terwujud sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas organisasi secara keseluruhan.

Untuk mengetahui sejauh mana usaha Camat dalam menerapkan prinsip dapat dimengerti, maka penulis melakukan Observasi terhadap tiga sub variabel dari prinsip dapat dimengerti yaitu sebagai berikut :

1. Menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari setiap unit kerja.

Keberhasilan dalam proses pengawasan, yaitu meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung, sangat bergantung

pada usaha Camat dalam menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari para pegawai, sehingga para pegawai dapat memahami akan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini sangat berkaitan dengan hasil kerja yang akan dicapai.

2. Menciptakan Ketertiban.

Meningkatnya

efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung, sangat ditentukan oleh kemampuan Camat menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam arti pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maupun kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

3. Menciptakan sinkronisasi.

Keberhasilan dalam proses pengawasan Camat dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung, sangat tergantung kepada Camat dalam menciptakan sinkronisasi dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga seluruh unit kerja yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan akan mengarah ke satu tujuan yaitu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari tanggapan responden di atas, maka dapat diketahui mengenai usaha Camat dalam menerapkan prinsip dapat dimengerti melalui tiga sub variabel sebagai berikut :

1. Menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari pegawai.

Sebanyak 15 orang responden (62,5%) menyatakan bahwa Camat selalu berusaha menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari setiap unit kerja, sedangkan sebanyak 5 orang responden (20,83%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang berusaha untuk menjelaskan tugas dan fungsi dari setiap unit kerja, dan sebanyak



4 orang responden (16,67%) menyatakan bahwa Camat tidak berusaha untuk menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari setiap unit kerja.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, ternyata Camat telah berusaha dengan cukup baik untuk menjelaskan tugas dan fungsi dari setiap unit kerja, sehingga dalam pelaksanaan tugas para pegawai benar-benar dapat memahami dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi dari unit kerjanya. Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

Melalui wawancara diperoleh keterangan, bahwa selalu diupayakan untuk menjelaskan tugas dan fungsi dari setiap unit kerja, agar dalam pelaksanaan tugas setiap pegawai dapat benar-benar memahami dan bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Berdasarkan observasi, ternyata sebagian besar pegawai dapat memahami tentang tugas dan fungsi dari unit kerja masing-masing. Hal ini terlihat dari adanya pembagian tugas yang jelas bagi setiap unit kerja, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan setiap pegawai benar-benar senantiasa berpedoman pada tugas serta fungsi masing-masing.

2. Menciptakan Ketertiban.

Sebanyak 14 orang (58,33%) menyatakan bahwa Camat selalu berusaha menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan kerja, sedangkan sebanyak 7 orang (29,17%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang berusaha menciptakan

ketertiban dalam pelaksanaan kerja, dan sebanyak 3 orang (12,5%) menyatakan bahwa Camat tidak berusaha untuk menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan kerja.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, ternyata Camat belum sepenuhnya menciptakan adanya ketertiban dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga belum sepenuhnya menunjang ke arah peningkatan efektivitas pelayanan dalam pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa untuk menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan pekerjaan, ternyata masih terdapat hambatan berupa masih rendahnya tingkat disiplin dalam layanan, terutama dalam penggunaan waktu kerja.

Berdasarkan observasi, nampak masih terdapat sebagian pegawai yang kadang-kadang memperhatikan tentang batas waktu dalam penyelesaian suatu pekerjaan. Misalnya dalam penyelesaian E-ktip dari hasil pelaksanaan suatu pekerjaan masih ada yang terlambat.

3. Menciptakan sinkronisasi

Sebanyak 17 orang responden (70,83%) menyatakan bahwa Camat selalu berusaha untuk menciptakan sinkronisasi dalam pelaksanaan pekerjaan, sedangkan sebanyak 4 orang responden (16,67%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang berusaha untuk menciptakan sinkronisasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan sebanyak 3 orang responden (12,5%) menyatakan bahwa Camat tidak berusaha untuk menciptakan sinkronisasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dari tanggapan responden tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Camat belum sepenuhnya berusaha

menciptakan sinkronisasi di antara unit-unit kerja yang ada, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan belum seluruh unit kerja mengarah kepada satu tujuan, yaitu tercapainya tujuan organisasi.

Melalui wawancara diperoleh keterangan, bahwa untuk menciptakan sinkronisasi ternyata masih mendapat hambatan berupa perbedaan kecakapan dan pengetahuan di antara para pegawai, sehingga masih terdapat salah pengertian di dalam pelaksanaan koordinasi.

Dari hasil observasi, ternyata masih ada sebagian pegawai yang kadang-kadang memahami posisinya dalam pelaksanaan koordinasi di bidang pekerjaannya. Hal ini jelas akan menghambat terciptanya sinkronisasi dan akan berpengaruh terhadap terhambatnya meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung. Misalnya dalam pelaksanaan tugas masih ada sikap yang kadang-kadang kooperatif di antara unit-unit kerja yang ada, dalam arti unit yang satu kadang-kadang menunjang terhadap unit yang lainnya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam penerapan tiga sub variabel dari prinsip dapat dimengerti, ternyata Camat telah berusaha dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari pencapaian nilai rata-rata tertinggi sebesar 63,86%. Kondisi demikian jelas menuntut adanya peningkatan usaha Camat dalam penerapan prinsip dapat dimengerti, agar tidak menghambat terhadap peningkatan dalam efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung dan tanggung jawab pegawai dalam pelaksanaan tugasnya, yang pada akhirnya akan menghambat dalam meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

6). Dapat menjamin tindakan-tindakan korektif.

Dalam proses pengawasan hendaknya seorang pimpinan organisasi berusaha untuk mewujudkan adanya kegiatan yang bersifat membimbing, mengarahkan dan memperbaiki segala sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maupun dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Hal ini bisa mewujudkan dengan melakukan tindakan-tindakan korektif apabila terjadi suatu penyimpangan, memberikan sanksi secara adil dengan menekankan tentang pentingnya pengawasan melekat.

Dari uraian-uraian tentang prinsip-prinsip pengawasan tersebut, maka dapat ditarik suatu simpulan bahwa penguasaan tentang prinsip-prinsip pengawasan oleh seorang pimpinan organisasi merupakan modal utama dalam melaksanakan pengawasan, sehingga pelaksanaan pekerjaan oleh para bawahan akan mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan rencana, perintah atau kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

1. Melakukan tindakan korektif.

Di dalam pelaksanaan pengawasan, hendaknya Camat selalu berusaha melakukan tindakan korektif terhadap suatu penyimpangan, agar pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga hasil dari pencapaian efektivitas kerja pegawai sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Menerapkan sanksi secara objektif.

Meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung, sangat tergantung dari kemampuan Camat dalam

menerapkan sanksi kepada para pegawai yang melanggar ketentuan kerja. Sanksi yang diberikan harus benar-benar objektif, sehingga para pegawai merasa diperlakukan secara adil. Hal ini dan dengan sendirinya akan menumbuhkan sikap aktif dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Menerapkan sistem pengawasan melekat.

Keberhasilan proses pengawasan dalam arti meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktp di Kantor Camat Ligung, sangat ditentukan oleh kemampuan Camat dalam menerapkan sistem pengawasan melekat, yaitu pelaksanaan pengawasan merupakan suatu kesatuan yang utuh, yang dilakukan mulai dari tingkatan terbawah sampai tingkatan teratas dalam organisasi.

Melalui sistem pengawasan melekat, diharapkan akan tercipta pola kerja yang memenuhi ketentuan maupun peraturan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan pembuatan e-ktp di Kantor Camat Ligung.

Dari tanggapan responden diketahui tentang penerapan tiga sub variabel dari prinsip dapat menjamin tindakan korektif oleh Camat, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan tindak korektif.

Sebanyak 11 orang responden (45,83%) menyatakan bahwa Camat selalu berusaha melakukan tindakan korektif, sedangkan sebanyak 9 orang responden (37,5%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang berusaha melakukan tindakan korektif dan 5 ada responden (20,83%) menyatakan bahwa Camat tidak berusaha melakukan tindakan korektif.

Dari tanggapan responden tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengawasan,

ternyata Camat belum sepenuhnya melakukan tindakan korektif, sehingga berpengaruh terhadap terhambatnya peningkatan efektivitas pelayanan pembuatan e-ktp di Kantor Camat Ligung.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil bahwa di akui belum sepenuhnya melakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan, karena masih mendapat hambatan berupa terbatasnya waktu dan rendahnya tanggung jawab pada diri pegawai dalam pemberian laporan.

Melalui observasi, terlihat bahwa sebagian besar pegawai masih belum memenuhi target penyelesaian pekerjaan khususnya dari waktu, seperti misalnya pembuatan laporan dari hasil kegiatan masih sering terlambat, sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut.

2. Menerapkan sanksi secara objektif.

Sebanyak 17 orang responden (66,7%) menyatakan bahwa Camat selalu berusaha menerapkan sanksi secara objektif, sedangkan sebanyak 3 orang responden (12,5%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang berusaha untuk menerapkan sanksi secara objektif dan 4 orang ada responden (16,67%) menyatakan bahwa Camat tidak berusaha untuk menerapkan sanksi secara objektif.

Dari komposisi tanggapan responden tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, Camat telah berusaha dengan cukup baik dalam menerapkan sanksi dalam proses kegiatan pekerjaan, sehingga para pegawai merasa diperlakukan secara adil. Hal ini jelas akan menunjang dalam mewujudkan peningkatan disiplin dan tanggung jawab pegawai dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga pada

akhirnya akan menunjang terhadap meningkatnya efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

Melalui wawancara diperoleh keterangan bahwa untuk menerapkan sanksi secara objektif, diakui masih mendapat hambatan berupa belum terpenuhinya fasilitas kerja yang benar-benar bisa menunjang kelancaran kerja sehingga terhadap adanya keterlambatan masih ada yang bisa ditolerir.

Melalui observasi, nampak fasilitas pada Kantor Camat Ligung, masih sangat minim. Hal ini berpengaruh terhadap terlambatnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan pegawai, misalnya untuk operasional lapangan ternyata jumlah kendaraan tidak sebanding dengan luas wilayah kerja, sehingga sulit dalam menentukan perbandingan yang rasional dalam penetapan sanksi antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya.

3. Menerapkan sistem pengawasan melekat.

Sebanyak 15 orang responden (62,5%) menyatakan bahwa Camat selalu berusaha untuk menerapkan sistem pengawasan melekat, sedangkan sebanyak 5 orang responden (20,83%) menyatakan bahwa Camat kadang-kadang berusaha untuk menerapkan sistem pengawasan melekat, dan sebanyak 4 orang responden (16,67%) menyatakan bahwa Camat tidak berusaha untuk menerapkan sistem pengawasan melekat.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Camat dalam pelaksanaan pengawasan, ternyata baru mencapai predikat kurang baik dalam menerapkan sistem pengawasan melekat, sehingga menghambat dalam meningkatkan efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa untuk menerapkan sistem pengawasan melekat, ternyata masih mendapat hambatan berupa belum meratanya kemampuan dan pengetahuan di antara para pimpinan unit kerja yang ada di Kantor Camat Ligung.

Melalui observasi, ternyata masih ada perbedaan kecakapan di antara para pegawai dengan Camat dalam memandang tugas dan fungsi pengawasan. Hal ini Nampak dari masih adanya pegawai yang meninggalkan suatu pelaksanaan tugas tanpa seijin atasan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan pengawasan, ternyata Camat belum secara maksimal menerapkan prinsip dapat menjamin tindakan-tindakan korektif, sehingga menghambat terwujudnya peningkatan disiplin dan tanggung jawab pada diri pegawai, yang pada akhirnya menghambat pencapaian disiplin kerja. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata penerapan prinsip pengawasan tersebut oleh Camat, baru mencapai sebesar 59,72%.

Camat dalam penerapan prinsip-prinsip pengawasan baru mencapai predikat “cukup baik” berdasarkan kriteria pengukuran analisis data (Tabel 1.1) Hal ini terlihat dari nilai rata-rata rekapitulasi tertinggi penerapan prinsip-prinsip pengawasan oleh Camat baru mencapai sebesar 60,18%. Kondisi demikian jelas menunjukkan bahwa Camat belum sepenuhnya berusaha didalam menerapkan prinsip-prinsip pengawasan, sehingga akan berpengaruh terhadap terhambatnya peningkatan efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung dan tanggung jawab pegawai dalam pelaksanaan tugas, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap meningkatnya

efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung.

Berdasarkan tanggapan responden tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung, ternyata baru nilai rata-rata tertinggi sebesar 57,29%. Dan bila dihubungkan dengan kriteria pengukuran analisis data, maka efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung, baru mencapai predikat cukup baik, tapi baru sampai batas interval terendah dari predikat cukup baik berdasarkan kriteria pengukuran analisis data.

Memperhatikan uraian-uraian tentang penerapan prinsip-prinsip pengawasan yang terangkum dalam tabel 4.7 maka dapat diketahui bahwa pengawasan Camat belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip-prinsip pengawasan, sehingga mempunyai pengaruh terhadap tingkat efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung. Hal ini terlihat dari rekapitulasi nilai rata-rata tertinggi penerapan prinsip-prinsip pengawasan sebesar 60,18% (tabel 4.7) dengan predikat “cukup baik”, menyebabkan pencapaian nilai rata-rata tertinggi efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip baru mencapai sebesar 57,29% (tabel 4.8) dan bila dihubungkan dengan kriteria pengukuran analisis data, ternyata baru mencapai predikat “cukup baik”, tapi baru sebatas interval terendah dari predikat cukup baik.

Berdasarkan uraian mengenai pembahasan pengawasan Camat dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung, maka dapat diketahui bahwa hipotesis yang penulis ajukan, yaitu: “Jika pelaksanaan pengawasan oleh

Camat didasarkan pada prinsip-prinsip pengawasan, maka efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung meningkat dan terbukti kebenarannya”.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Camat Ligung dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung belum sepenuhnya merupakan prinsip-prinsip pengawasan, hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan responden sebagai berikut :

1. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Camat dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip di Kantor Camat Ligung pelaksanaannya belum efektif, hal ini terbukti dari pengujian hipotesis terhadap penerapan prinsip-prinsip pengawasan yang baru mencapai 60,18% hal ini adalah penilaiannya cukup baik sedangkan efektivitas pelayanan pembuatan e-ktip baru mencapai 57,29% yaitu cukup baik.
2. Belum di terapkannya prinsip-prinsip pengawasan secara maksimal oleh Camat, dikarenakan masih mendapat beberapa hambatan, di antaranya adalah :
 - (1). Keterbatasan waktu, sehingga menghambat dalam penerapan prinsip :
 1. pengawasan merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan yang harus di awasi, yaitu dalam hal mengetahui sifat-sifat pekerjaan pegawai serta dalam hal menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari pekerjaan.



2. menjamin tindakan-tindakan korektif, yaitu dalam hal melakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan.
- (2). Masih adanya perbedaan individu pegawai, sehingga menghambat dalam penerapan prinsip :
 1. dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan, yaitu dalam hal melakukan tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan serta dalam hal melakukan evaluasi terhadap hasil kerja pegawai.
 2. dapat dimengerti, yaitu dalam hal mengupayakan sinkronisasi di antara unit-unit kerja.
 3. dapat menjamin tindakan-tindakan korektif, yaitu dalam hal mengupayakan adanya pengawasan melekat.
- (3). Terbatasnya dana, sehingga menghambat dalam penerapan prinsip merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan fasilitas kerja bagi para pegawai.
- (4). Masih rendahnya tingkat efektivitas kerja pegawai dalam pelayanan pembuatan e-ktip, sehingga menghambat dalam penerapan prinsip :
 1. Ekonomis, yaitu dalam hal menekan tingkat kebocoran.
 2. dapat dimengerti, yaitu dalam mengupayakan adanya ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, L James. 1985. Organisasi, Prilaku, Struktur Proses edisi ke lima jilid 1, Jakarta : PT. Midas Surya Grafindo
- Gibson, L James. 1996. Organisasi, Prilaku, Struktur Proses edisi ke delapan jilid1, Jakarta : Binarupa Aksara
- Handyaningrat, Soewarno. Drs. 1981. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta : Cv Haji Masagung
- Handoko MBA, T Hani. Dr. Manajemen edisi ke dua. 2011. Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta
- Lubis, Ibrahim. Drs. H. 1985. Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Mahmudi. 2013. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Makmur M.Si, Prof. Dr. 2010. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Bandung : PT. Reflika Aditama
- Manullang, M. Drs. 2001. Dasar-Dasar Manajemen, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Saefullah Kurniawan Sule Trisnawati Ernie. 2011. Pengantar Manajemen, Jakarta : Kencana Prenada Media group
- Sarwoto, Drs. 1986. Dasar - Dasar Organisasi dan Manajemen, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Siagian M.P.A, Sondang P. Prof. Dr. 2003. Filsafat Administrasi edisi revisi, Jakarta : PT. Bumi Askara
- Siagian M.P.A, Sondang P. Prof. Dr. 1983. Organisasi Kepemimpinan



- Dan Prilaku Administrasi, Jakarta
: Gunung Agung
- Silalahi MA, Ulber. Dr. 2011. Asas - Asas
Manajemen, Bandung : PT.
Reflika Aditama
- Steers, Richard. M. 1985. Efektivitas
Organisasi seri manajemen no 4,
Jakarta : Erlangga
- Suharsimi, Arikunto. Prof. Dr. 2002.
Prosedur Penelitian Suatu
Pendekatan Praktek, Jakarta :
Rineka Putra
- Terry, R George. Ahli bahasa Dr. Winardi
S.E. 2006. Asas - Asas
Manajemen, Bandung : PT.
Alumni
- Terry, R George. Dan L. W. Pue. 1996.
Dasar - Dasar Manajemen,
Jakarta: Bumi Askara
- Winardi S.E, Dr. 1983. Dasar - Dasar Ilmu
Management, Bandung : PT.
Alumni